

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Riau, yang juga disebut Kepri, adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan di Indonesia. Hingga tahun 2020, Kepulauan Riau dihuni oleh 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan penduduk 252 jiwa/km². Kota Batam dihuni oleh 58% dari total penduduk. Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, dan 299 Desa/Kelurahan, dengan 2.408 pulau besar dan kecil, yang 30% di antaranya masih belum diberi nama. Luas wilayahnya 8.201,72 km², dengan sekitar 96% berupa lautan dan hanya 4% berupa daratan. Kepulauan Riau dibentuk sebagai provinsi ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Terdiri dari Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga (Chriswardani Suryawati, 2005).

Sejarah Kepulauan Riau berawal dari ditemukannya Prasasti Pasir Panjang di Kabupaten Karimun yang memuat semboyan pemujaan melalui telapak kaki Buddha. Buddha dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok dan India ke sana. Dengan berdirinya Kesultanan Riau-Lingga, maka berkembang pula masa Islam di Kepulauan Riau. Kesultanan ini didirikan atas dasar kepercayaan Islam Melayu, dan Islam sendiri dibawa ke sana oleh para pedagang dari Gujarat, India, dan Arab.

Secara historis, Tanjungpinang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga dan pernah menjadi bagian dari Kerajaan Malaka sebelum jatuh ke

tangan Portugis. Tanjungpinang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Malaka dan kemudian Kesultanan Johor oleh Sultan Mahmud Syah. Pada abad ke-18, kota ini terlibat dalam Perang Riau (1782–1784) antara Kesultanan Riau dan VOC Belanda. Pada tahun 1957, Tanjungpinang menjadi ibu kota Provinsi Riau setelah Indonesia merdeka. Namun, pada tahun 1959, ibu kota dipindahkan ke Pekanbaru. Hingga tahun 2000, statusnya adalah kota administratif. Pada tanggal 21 Juni 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 menentukannya sebagai Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang kembali menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2002 setelah pemekaran dari daratan Riau. Geografisnya, Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan bersama dengan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompok dan Pulau Penyengat. Kota ini juga memiliki pelabuhan laut Sri Bintan Pura yang menghubungkan ke pulau-pulau Kepri serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kota ini juga terkenal sebagai tempat wisata dengan destinasi seperti Pulau Penyengat dan Pantai Trikora.

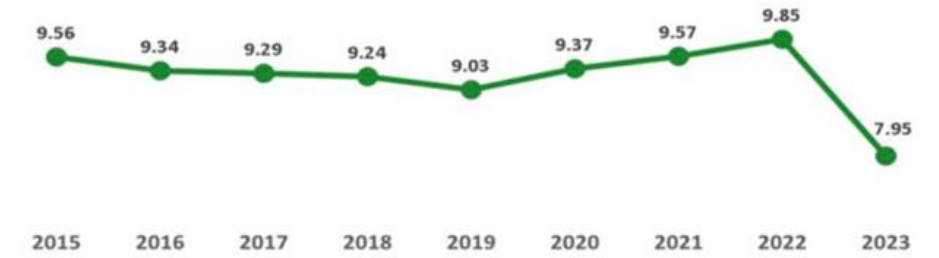
Menurut Suryawati, (2005), kemiskinan merupakan suatu kondisi yang tidak hanya ditandai dengan kekurangan uang dan pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup banyak aspek lainnya, seperti kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, perlakuan yang tidak adil dalam hukum terkait dengan ancaman tindakan kriminal, dan ketidakberdayaan seseorang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti permodalan, sarana produksi, pemasaran, serta peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Faktor eksternal seperti tarif, fluktuasi harga bahan bakar, dan regulasi lain yang

menaikkan harga barang dan jasa juga menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi semakin terbatas.

Sulistiyani (Pairan, 2015:294) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang menunjukkan bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan sejauh mana upaya tersebut dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, banyak program penanggulangan kemiskinan yang hanya berfokus pada bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, tanpa mencari cara untuk mengurangi beban kemiskinan secara bertahap melalui peningkatan keterampilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan memiliki berbagai fase yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, terutama di daerah-daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi.

Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum. Kemiskinan telah menjadi masalah yang melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kemiskinan lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Angka pengangguran yang tinggi ditambah dengan banyaknya jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan layak dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan salah satu tanda adanya fenomena kemiskinan di suatu negara.

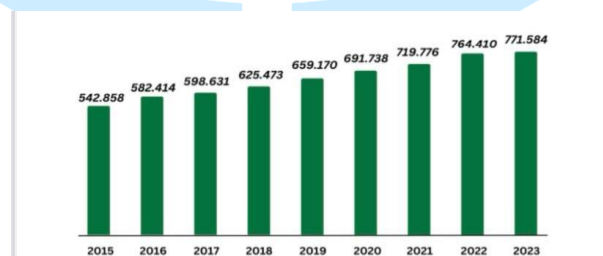
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang, 2015-2023



Sumber Data: (BPS) Kota Tanjungpinang, 2023

Secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang cenderung menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan kecenderungan penurunan yang melambat. Namun, keadaannya berbeda saat dimulai pada tahun 2020. Angkanya meningkat menjadi 9,37% pada tahun 2020, kemudian menjadi 9,57% pada tahun 2021, dan kembali mencapai puncaknya pada tahun 2022 menjadi 9,85%. Akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 dan 2022, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang meningkat. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 turun menjadi 7,95%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2 Garis Kemiskinan di Kota Tanjungpinang, 2015-2023

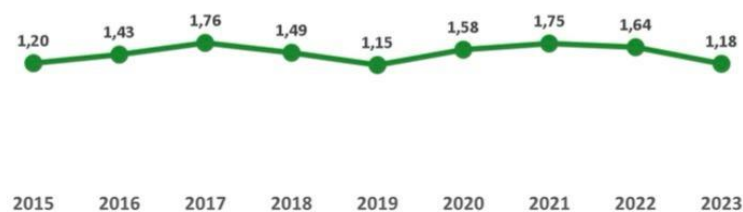


Sumber Data: (BPS) Kota Tanjungpinang, 2023

Garis kemiskinan digunakan untuk membagi penduduk menjadi miskin dan tidak miskin. Penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan disebut miskin. Garis kemiskinan Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Gambar 3 menunjukkan bahwa garis kemiskinan tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari Rp542.858 pada tahun 2015 menjadi Rp771.584 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa biaya hidup penduduk Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp771.584.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya seberapa banyak atau berapa persen jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan juga harus diperhatikan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya harus mampu menekan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus mampu menekan angka kemiskinan secara keseluruhan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Gambar 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Tanjungpinang, 2015-2023



Sumber Data: (BPS) Kota Tanjungpinang, 2025

Grafik indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Nilai tertinggi sebesar 1,76

pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 1,75 pada tahun 2021. Nilai terendah sebesar 1,20 pada tahun 2015 dan 2019, serta 1,15 pada tahun 2019. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,18. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan gambaran distribusi pengeluaran pada penduduk miskin, semakin tinggi nilai menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran pada penduduk miskin. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 indeks ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, dengan nilai terendah sebesar 0,23 pada tahun 2019 dan nilai tertinggi sebesar 0,52 pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2022 mencapai 0,44, turun 0,08 poin dari tahun 2021, dan kembali turun pada tahun 2023, yaitu mencapai 0,33.

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan), 2022-2023

Kepulauan Riau	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	
	2022	2023
Provinsi Kepulauan Riau	684.070	742.526
Kabupaten Karimun	446.856	446.332
Kabupaten Bintan	447.933	474.674
Kabupaten Natuna	449.302	480.103
Kabupaten Lingga	507.223	540.936
Kabupaten Kepulauan Anambas	452.220	481.718
Kota Batam	783.730	854.465
Kota Tanjungpinang	764.410	771.584

Sumber Data: (BPS) Kota Tanjungpinang, 2023

Bisa dilihat pada tabel diatas, Garis kemiskinan BPS diterbitkan untuk menghitung berapa jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan Kota Tanjungpinang meningkat menjadi Rp771.584 per bulan pada tahun 2023.

Angka ini menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan setiap orang setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik makanan maupun

nonmakanan. Inflasi dan perubahan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi peningkatan garis kemiskinan ini. Selain itu, persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang akan menurun menjadi 6,96% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,95%.

Penanggulangan kemiskinan terjadi melalui upaya meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan lebih banyak uang. Dibandingkan dengan aspek lain, seperti faktor budaya, dimensi ekonomi menjadi sasaran dan prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan. Konsep ini menghasilkan kesimpulan bahwa penanggulangan kemiskinan dominan dilakukan dengan menggunakan skema peningkatan pendapatan.

Jadi untuk membuat rencana terbaik dalam mengurangi kemiskinan, perlu dilakukan penelitian yang menyeluruh dan tepat. Ini dimulai dengan memahami karakteristik utama masyarakat dan sumber utama kemiskinan, berdasarkan uraian permasalahan di atas masih terdapat hambatan serta tantangan untuk mencegah terjadinya maraknya kemiskinan. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **"Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang"**

1.2 Rumusan Masalah

Sugiyono menyatakan bahwa rumusan masalah merupakan pertanyaan yang dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan penelitian. Rumusan masalah berfungsi sebagai dasar penelitian untuk melangkah maju dan membantu mengidentifikasi masalah yang muncul selama penelitian. Berdasarkan latar

belakang dalam penelitian yang diteliti, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian yang diteliti yakni:

**“ Bagaimana Evaluasi Kebijakan Publik yang diterapkan Oleh Dinas
Sosial Sosial Kota Tanjungpinang “**

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah pencarian fakta ilmiah yang dapat dipahami dan diterima oleh akal budi melalui analisis yang sistematis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di angkat, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

**“Mengevaluasi seberapa baik kebijakan penanggulangan kemiskinan yang
diterapkan oleh Dinas Sosial Kota”**

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat teoritis memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam aspek evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Yang dimana dapat memperkuat teori-teori tentang evaluasi kebijakan publik, baik yang terkait dengan model evaluasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan. Dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca dan Mahasiswa/I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji tentang “Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang”

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari evaluasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi targetnya sehingga tujuan pengurangan kemiskinan bisa tercapai secara optimal. Diharapkan temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait lainnya. Selain itu, mereka yang terlibat dalam proyek "Evaluasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang".